

Pernyataan mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, ketika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022, akhirnya berbuntut panjang. Atas pernyataan Kusnadi, KPK memanggil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk dimintai keterangan sebagai saksi di Polda Jatim pada Kamis (10/7/2025). Sebagai gubernur, Khofifah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, keterangannya dibutuhkan untuk menuntaskan kasus yang sebelumnya telah memenjarakan mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simandjuntak. Kasus ini belum selesai, karena 21 tersangka yang telah ditetapkan KPK masih belum diproses di pengadilan. Apakah kasus ini akan terus berkembang, bergantung pada hasil penyidikan KPK.

EDISI JUMAT, 11 JULI 2025

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02

GOVERNMENT
Menlu RI Ingin ASEAN-China Perkuat Kemitraan Ekonomi dan Jaga Stabilitas Kawasan

05

NUSANTARA
Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Batal, Menteri Ara Minta Maaf

10

LISTSTYLE
Umbria, Kota Mewah Italia yang Tak Banyak Dikenal

KASUS DANA HIBAH JATIM, KPK PERIKSA GUBERNUR KHOFIFAH

BACA HAL 11...

KRONOLOGI KASUS SUAP DANA HIBAH JATIM

 **14 Des 2022**

- KPK OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak dan stafnya Rusdi di DPRD Jatim. OTT terkait penyerahan uang dari Ilham Wahyudi ke Rusdi di mal Surabaya, terkait dana hibah APBD Jatim 2023. KPK juga tangkap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi di Sampang. Sahat terima suap Rp 1 miliar dari total komitmen fee

 **26 Sep 2023**

- PN Tipikor Surabaya vonis Sahat:
 - 9 tahun penjara
 - Denda Rp 1 miliar (subsider 6 bulan)
 - Ganti rugi Rp 39,5 miliar
- Rusdi divonis:
 - 4 tahun penjara
 - Denda Rp 200 juta (subsider 3 bulan)

 **12 Jul 2024**

- KPK tetapkan 21 tersangka pengembangan kasus:
 - 4 penerima suap (3 pejabat, 1 staf)
 - 17 pemberi suap (15 swasta, 2 pejabat)
- Tersangka pejabat yang sudah ada sprindik: Kusnadi (Ketua DPRD Jatim), Achmad Iskandar (Wakil Ketua), Anwar Sadad (Wakil Ketua), Mahhud (Anggota DPRD), dll.

 **15-22 Mei 2025 & 19 Jun 2025**

- KPK sita aset: tanah & bangunan di Probolinggo, Banyuwangi, Pasuruan, 2 rumah di Surabaya dan Mojokerto.



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan keterangan usai menjalani pemeriksaan KPK di Mapolda Jatim, Kamis (10/7/2025).
(Foto : ANTARA)

MENLU RI INGIN ASEAN-CHINA PERKUAT KEMITRAAN EKONOMI DAN JAGA STABILITAS KAWASAN

Kondisi geopolitik dan kondisi perekonomian global akibat kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, maka Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, mengatakan supaya memperkuat kemitraan strategis komprehensif dalam berbagai bidang antara ASEAN dan China. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-China di sela-sela rangkaian ASEAN Foreign Ministers' Meeting/Post-Ministerial Conference (AMM/PMC) ke-58 di Kuala Lumpur, Malaysia (10/7/2025).

Dia mengatakan bahwa hubungan ASEAN-China termasuk yang paling dinamis dan berdampak besar di kawasan. "Kita harus memastikan bahwa kemitraan ini tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga mampu menghadapi tantangan geopolitik," ujar Menlu Sugiono.

Menlu Sugiono juga mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 tahun ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekonomi kawasan yang lebih terbuka dan terintegrasi.

Di samping itu, Indonesia menyambut baik inisiatif "Visa ASEAN" China untuk mempermudah perjalanan pelaku bisnis dari negara-negara ASEAN dan Timor-Leste. Indonesia juga mengapresiasi penyelenggaraan KTT ASEAN-GCC (Gulf Cooperation Council)-China pada Mei lalu sebagai langkah strategis pemajuan ekonomi kawasan.

Menlu Sugiono mendorong pemajuan ekonomi tersebut di berbagai sektor prioritas seperti ekonomi digital, transisi energi bersih, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur. "Saatnya menindaklanjuti kesepakatan para pemimpin kita dengan langkah-langkah nyata," tegasnya.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa kemitraan ASEAN-China perlu terus dikembangkan. Kemitraan tersebut tidak hanya dari aspek ekonomi namun juga dalam menjaga



perdamaian dan stabilitas kawasan.

"Kita harus meningkatkan kerja sama penegakan hukum dan respons bersama terhadap ancaman kejahatan transnasional. Dan kita harus pastikan bahwa wilayah maritim kita tetap menjadi kawasan yang damai sesuai aturan yang berlaku," tegas Menlu Sugiono.

Dalam menjaga stabilitas wilayah laut di kawasan, Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk bekerja sama secara erat dengan China dan negara ASEAN lainnya guna menyelesaikan perundingan Code of Conduct di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2026.

Menlu Sugiono kembali menegaskan bahwa hanya dengan kemitraan yang setara, maka ASEAN dan China dapat mewujudkan kerja sama saling menguntungkan untuk kawasan damai, stabil, dan sejahtera.

Sejak 2009 atau setidaknya sudah 16 tahun berturut-turut China menjadi mitra dagang terbesar ASEAN. Kemudian, dalam enam tahun terakhir, ASEAN juga menjadi mitra dagang terbesar bagi China. Pertemuan PMC ASEAN dengan China, sebagai salah satu Mitra Dialog, rutin dilakukan setiap tahun. Pada gelaran tahun ini, Menlu RRT Wang Yi turut hadir dalam pertemuan.

Sementara, pada hari sebelumnya, Rabu (9/7/2025), Menlu Sugiono

mengangkat pentingnya menjaga kesatuan ASEAN dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan kawasan yang semakin kompleks. "ASEAN harus menegaskan kembali perannya sebagai jangkar tatanan regional. Kesatuan dan sentralitas ASEAN tidak dapat dikompromikan," tegas Menlu RI.

Dia mengatakan bahwa krisis berkepanjangan di Myanmar masih menjadi perhatian utama. Five-Point Consensus tetap menjadi rujukan bersama yang mencerminkan komitmen kolektif ASEAN dalam mendukung penyelesaian krisis di Myanmar. "Penghentian kekerasan segera serta penyaluran bantuan kemanusiaan harus terjadi," ujar Menlu Sugiono.

Kemudian terkait dengan ancaman kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara juga menjadi sorotan Menlu Sugiono. Kejahatan tersebut khususnya kasus online scams yang semakin meningkat dan memicu tindak kejahatan terkait, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perdagangan narkoba.

Pertemuan ini turut menyambut kemajuan dalam perundingan Code of Conduct in the South China Sea (COC), sejalan dengan mandat para Menlu ASEAN di tahun 2023 melalui Guidelines for Accelerating the Early Conclusion of an Effective and

Substantive Code of Conduct in the South China Sea.

"ASEAN perlu mempertahankan komitmennya terhadap penyelesaian COC yang substantif dan efektif, yang diharapkan dapat membantu untuk menjaga stabilitas maritim di Laut China Selatan," ujar Menlu RI.

Di tengah ketidakpastian geopolitik yang diwarnai dengan krisis dan eskalasi konflik di berbagai belahan dunia, Menlu RI juga menyampaikan pentingnya kesiapsiagaan ASEAN dalam melindungi warga negaranya yang berada di wilayah konflik. Dalam situasi tersebut, ditegaskan kembali pentingnya implementasi dari instrumen dan kerangka kerja sama yang telah disepakati, yakni melalui Guidelines for the Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third Countries to Nationals of ASEAN Member Countries in Crisis Situations.

ASEAN memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan kawasan tetap tangguh, kohesif, dan proaktif dalam membentuk arsitektur kawasan yang damai dan stabil.

Sementara itu, dilansir dari freemalaysiatoday.com, ASEAN mengintensifkan upaya untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan strategis melalui diskusi internal dan keterlibatan dengan mitra dialog.

Dari integrasi infrastruktur hingga kesepakatan perdagangan bebas dan program bantuan miliaran dolar, Asia Tenggara memasuki era yang dapat dianggap sebagai era berkurangnya keterlibatan ekonomi AS.

Di antara upaya utama yang mendapatkan dukungan adalah Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), sebuah inisiatif yang menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikordej Balankura, menunjukkan kemajuan baru.

Ia mengatakan kemajuan tersebut kini didorong oleh Cetak Biru Implementasi IMT-GT 2022-2026 dan perjanjian terbaru seperti Kerangka Kerja Sama (FOC) di bidang Kepabeanan, Imigrasi, dan Karantina (CIQ), yang ditandatangani pada bulan Mei.

"Kerangka kerja ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi perbatasan, menyederhanakan prosedur perbatasan, dan mendorong pengakuan inspeksi dan sertifikasi perbatasan untuk memudahkan pergerakan barang dan orang," ujarnya kepada FMT di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-58 dan Konferensi Pasca-Menteri (AMM-PMC). (rls,ist/lut)

"Kita harus memastikan bahwa kemitraan ini tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga mampu menghadapi tantangan geopolitik,"

SUGIONO
Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia



Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi.

KOMISI VII DPR RI PRIHATIN KONDISI TVRI DAN RRI

Komisi VII DPR RI merasa prihatin dengan kondisi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI yang menghadapi ketimpangan besar antara kebutuhan dan alokasi anggaran yang diterima. Dampaknya TVRI dan RRI susah untuk meningkatkan kualitas konten dan pelayanan publik. Keprihatinan ini terlontar saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Direktur Utama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Terkait dengan kondisi itu, komisi VII menyetujui penambahan anggaran pada LPP TVRI, LPP RRI dan LKBN Antara yang akan dibahas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

"Saya yang paling keras prihatin terhadap kondisi TVRI. Tahun 2025 lalu, dari pagu indikatif yang hanya 30 persen, anggarannya terus dipotong dari Rp 455,7 miliar menjadi Rp 312,2 miliar. Ini lembaga penyiaran publik, tapi dipotong berkali-kali," ungkap Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi.

Ia menyoroti bahwa sebagian besar anggaran TVRI habis hanya untuk belanja pegawai dan keperluan administratif kelembagaan, sehingga tidak cukup mendorong peningkatan kualitas konten dan pelayanan publik.

"Belanja pegawai Rp 189 miliar, operasional Rp 185 miliar. Tapi kebutuhan seperti infrastruktur, sewa transponder, keamanan siber, dan konten siaran kenegaraan tidak bisa

terpenuhi. Ini membuat TVRI tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal," tambah politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut.

Lebih lanjut, Erna menegaskan bahwa TVRI memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat di pedesaan yang selama ini mengandalkan siaran publik sebagai sumber informasi utama. Ia mengkritisi kurangnya dukungan pemerintah terhadap TVRI di tengah semangat mewujudkan kedaulatan media dan transformasi digital nasional.

"Pemerintah terus menggaungkan digitalisasi dan kedaulatan media, tapi mana dukungannya untuk TVRI? Jangan lupakan masyarakat di desa yang nonton TVRI, bukan Netflix," ujar Erna.

Erna juga mengungkapkan kondisi siaran TVRI di daerah yang memprihatinkan. Ia menyebut banyak program hanya siaran ulang karena keterbatasan anggaran, kecuali untuk berita yang tidak diperbolehkan tayang ulang.

Senada dengan Erna, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana, juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun 2026 yang diajukan LPP TVRI dan RRI. Ilham menegaskan bahwa rancangan anggaran kedua lembaga penyiaran tersebut terlalu berat di sisi manajemen dan tidak mencerminkan prioritas pada fungsi utama sebagai media penyiaran publik.

"Prinsipnya kami menyetujui

usulan tambahan anggaran yang diajukan. Tapi ada catatan penting, terutama soal alokasi program di RRI, di mana 98 persen anggaran diarahkan untuk dukungan manajemen, sementara hanya 2 persen untuk program penyiaran publik yang justru menjadi core business lembaga ini," tegas Ilham.

Hal serupa juga terjadi pada TVRI. Ilham mencatat bahwa 63 persen alokasi anggaran justru untuk dukungan manajemen, sementara hanya 37 persen yang benar-benar dialokasikan untuk program siaran publik. Menurutnya, komposisi ini menunjukkan ketidakseimbangan prioritas dan perlu dikaji ulang secara serius.

"Angka-angka ini tidak mencerminkan orientasi lembaga pada tugas utamanya sebagai penyiar publik. Seharusnya justru anggaran terbesar dialokasikan untuk produksi dan penyiaran program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya.

Ilham pun meminta agar kedua lembaga melakukan koreksi terhadap struktur anggaran tersebut sebelum Komisi VII menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan—masing-masing sebesar Rp1 triliun untuk TVRI dan Rp600 miliar untuk RRI.

Menurutnya, penyusunan anggaran yang terlalu dominan pada sektor manajerial menunjukkan ketidaktepatan sasaran dan berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran publik.

"Kalau anggarannya lebih besar untuk manajemen daripada untuk penyiaran, berarti perencanaan ini tidak presisi dan tidak objektif. Harus ada koreksi. Jangan sampai fungsi utama sebagai lembaga penyiaran

publik terpinggirkan," tandas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ilham juga menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar mendukung peningkatan kapasitas lembaga penyiaran publik, asalkan dilakukan secara akuntabel dan proporsional. Ia berharap revisi alokasi anggaran dapat segera dilakukan agar penambahan dana benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas penyiaran publik di Indonesia.

Untuk diketahui, di awal tahun kemarin, RRI dan TVRI sempat mengalami pemangkasan anggaran. Hal ini mengakibatkan kedua LPP itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PKH), namun keduanya akan memanggil kembali pekerja yang diberhentikan imbas pemangkasan anggaran. Kedua lembaga penyiaran milik pemerintah itu melakukan penyesuaian atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.

Pengurangan pegawai di dua lembaga penyiaran ini akibat keputusan pemerintahan Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Awalnya pagu anggaran TVRI pada 2025 sebesar Rp 1,52 triliun. Lalu pemerintah memangkasnya 48 persen menjadi Rp 1,06 triliun. Sedangkan pagu anggaran RRI pada 2025 sebesar Rp 1,07 triliun. Pemerintah lantas memangkas anggaran RRI sebesar Rp 170 miliar sehingga menjadi Rp 899 miliar.

Pada 12 Februari 2025 lalu Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, mengatakan bahwa TVRI tidak lagi merumahkan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai dan contributor.

Kemudian, anggota Komisi VII DPR, Bane Raja Manalu, menilai pembatalan PHK oleh TVRI dan RRI terhadap sejumlah pegawainya merupakan langkah yang tepat. "Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri," kata Bane pada Rabu (12/7/2025). (rls,ist/lut)

"Saya yang paling keras prihatin terhadap kondisi TVRI. Tahun 2025 lalu, dari pagu indikatif yang hanya 30 persen, anggarannya terus dipotong dari Rp 455,7 miliar menjadi Rp 312,2 miliar. Ini lembaga penyiaran publik, tapi dipotong berkali-kali,"

ERNA SARI DEWI

Anggota Komisi VII DPR RI

EKSTRADISI PERTAMA INDONESIA-RUSIA

Buronan Aleksandr Zverev Dipulangkan lewat Bandara Soetta

Penyerahan termohon warga negara Rusia bernama Alexander Vladimirovich Zverev atau AVZ merupakan langkah ekstradisi pertama antara Pemerintah Federasi Rusia dan Pemerintah Indonesia.



Warga negara (WN) Rusia Alexander Vladimirovich Zverev tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (10/7/2025). (ist)

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) Widodo menjelaskan alasan ekstradisi buronan Rusia, Alexander Vladimirovich Zverev alias Aleksandr Zverev (AVZ).

Ia mengatakan, hal itu merupakan kesepakatan saat pertemuan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto dan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

"Secara tidak langsung, ini hasil dari pertemuan Presiden RI dengan Presiden Rusia, beberapa waktu lalu," kata Widodo di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis, (10/7/2025).

Alexander Vladimirovich Zverev masuk ke Indonesia pada tahun 2022. Ia masuk dalam daftar buronan Interpol, Interpol Red Diffusion menerbitkan pemberitahuan pencariannya pada Maret 2022.

"Ia telah diamankan tahun 2022 oleh kepolisian, dan tahun itu ada permintaan dari pihak sana (Rusia), ya tentu kita berproses ya, karena itu butuh waktu, komunikasi secara diplomatik melalui kementerian luar negeri, terus kemudian koordinasi dengan kementerian hukum selaku otoritas pusat dan kemudian ya tentu karena kementerian hukum ini otoritas pusat, dia mengkoordinasikan seluruhnya," ujarnya.

Nantinya, Alexander Vladimirovich Zverev alias Aleksandr Zverev (AVZ) akan melakukan penerbangan transit di Denpasar, Bali menggunakan pesawat komersil untuk menuju negaranya Rusia. Direncanakan, penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta akan ke Denpasar, Bali pukul 18.00 atau 19.00 WIB. Kemudian, dilanjutkan penerbangan langsung ke Moskow, Rusia.

Bentuk Organisasi Kriminal

Dalam kasusnya, Aleksandr Zverev diduga melakukan tindak pidana pembentukan organisasi kriminal (creation of a criminal community), penyalahgunaan kewenangan (exceeding official powers), penyuapan (bribes-taking), dan pelanggaran kerahasiaan pribadi (invasion of personal privacy).

Tindakannya tersebut melanggar peraturan perundang-undangan Rusia

dengan ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun penjara.

Dia kemudian diduga melarikan diri hingga kemudian ditangkap Polda Metro Jaya pada 12 Juni 2022 di Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan itu berdasarkan Interpol Red Diffusion yang diajukan oleh otoritas berwenang di Rusia. Proses ekstradisi kemudian dimulai dengan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 1 November 2024, Hakim menetapkan permintaan ekstradisi dikabulkan. Presiden Prabowo kemudian menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 2 Juni 2025.

Pada pokoknya mengabulkan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Federasi Rusia tersebut dan menunjuk Menteri Hukum RI selaku Otoritas

Pusat dalam serah terimanya.

Warga negara (WN) Rusia Aleksandr

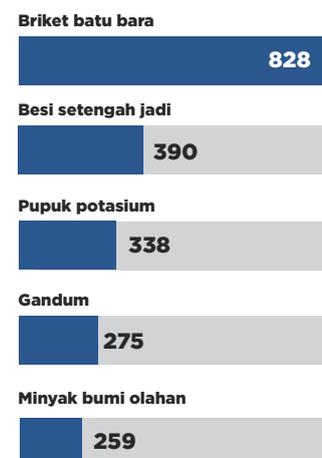
Proses ekstradisi sudah dimulai pada Kamis pagi dengan dibawanya Aleksandr Zverev ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejari Jaksel bertindak sebagai executing agency. Sementara Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, ditunjuk selaku Otoritas Pusat untuk melaksanakan penyerahan termohon ekstradisi Aleksandr Zverev.

"Keberhasilan penyerahan Termohon Ekstradisi ini merupakan keberhasilan bersama seluruh Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia, dan Pemerintah Federasi Rusia. Oleh karena itu seyogyanya dapat dijadikan salah satu rujukan

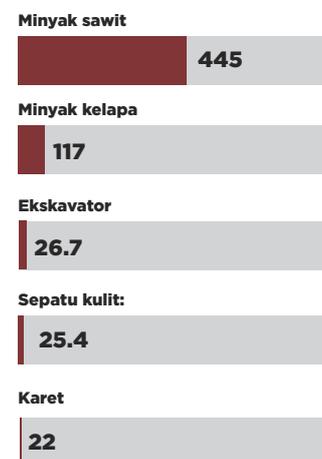
dalam proses kerja sama ekstradisi berikutnya, guna memberantas kejahatan lintas negara," ujar Widodo.

"Pelaksanaan ekstradisi ini sekaligus berlangsung dalam momen bersejarah hubungan bilateral Indonesia dan Rusia, yang pada tahun ini genap memasuki 75 tahun hubungan diplomatik. Penyerahan ini menjadi simbol dari keterbukaan dan kepercayaan kedua negara dalam membangun kemitraan yang lebih erat di bidang hukum dan penegakan keadilan," sambungnya. (wid,rls,ant,ist/dya)

KOMODITAS EKSPOR RUSIA KE INDONESIA 2023 (US\$ JUTA)



KOMODITAS EKSPOR INDONESIA KE RUSIA 2023 (US\$ JUTA)



termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf," kata dia menambahkan. (wid,rls,ist/dya)

Matangkan Studi Pembangunan Reaktor Nuklir

PEMERINTAH Indonesia masih mematangkan rencana kerja sama dengan Rusia terkait pengembangan energi nuklir melalui pembangunan Small Modular Reactor (SMR) dengan modular 500 megawatt. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, rencana kerja sama itu masih berada pada tahap studi kelayakan (feasibility study).

"Kalau nuklir kan kita feasibility study terlebih dahulu. Di dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik), kita memang merencanakan untuk membangun nuklir sampai dengan 500 megawatt," ujar Airlangga di St Petersburg Juni lalu.

Airlangga menyebutkan, studi ini menjadi langkah awal untuk menyiapkan fondasi teknologi dan regulasi dalam mendukung

pengembangan energi nuklir yang aman dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, reaktor modular skala kecil dinilai lebih efisien dan fleksibel jika dibandingkan dengan pembangkit nuklir konvensional. Diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, Rusia siap menjalin kerja sama di sektor nuklir dengan Indonesia.

"Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir," kata Putin dalam pernyataan pers se usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Constantine St Petersburg, Kamis (19/6/2025).

Putin menyebutkan, kerja sama tersebut akan mengedepankan aspek-aspek perdamaian. "Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai,

RUMAH SUBSIDI 18 METER PERSEGI BATAL, MENTERI ARA MINTA MAAF

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), resmi membatalkan wacana pemangkasan batas minimal luas rumah subsidi menjadi hanya 18m². Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Kamis (10/7/2025), Ara mengawali penjelasannya dengan permintaan maaf terbuka.



Gambaran rumah subsidi dengan ukuran 18 meter persegi yang dibatalkan. Dok

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) membatalkan wacana rumah subsidi diperkecil menjadi 18 meter persegi. Ara mengatakan, banyak respons negatif terkait wacana ini.

persegi menjadi 18 meter persegi. Karena hal itu, Ara mengaku mendapatkan banyak masukan dan pandangan.

"Hari ini kami menyampaikan permohonan maaf... Ide ini mungkin kurang tepat, tapi tujuannya baik... Ide di ranah publik harus lebih dipertimbangkan lagi," ujarnya penuh kesungguhan.

Ara menyebut gagasan ini lahir dari aspirasi anak muda yang ingin tinggal di perkotaan, namun menghadapi halangan tinggi berupa harga tanah yang selangit. Namun, setelah menerima banyak masukan dari para anggota Komisi V dan publik, ia menyadari bahwa pendekatan tersebut terlalu ekstrem.

Usulan rumah subsidi berukuran mini ini langsung memicu gelombang kritik. Tak hanya politisi, netizen di ruang publik menyebutnya "subsidiDIE" menunjukkan penolakan terhadap ide tersebut.

Menjawab kritik tajam, Ara menyampaikan "Maka saya sampaikan permohonan maaf secara terbuka, dan saya cabut ide itu."

Rencana tersebut sempat tercantum dalam draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 yang mengatur batasan luas lahan, luas lantai, harga jual rumah subsidi, serta besaran bantuan uang muka. Namun, dokumen itu belum bersifat final dan masih berupa rancangan.

Dengan dicabutnya wacana tersebut, ketentuan mengenai rumah subsidi tetap mengacu pada aturan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023. Dalam aturan ini, rumah subsidi tapak

memiliki luas tanah minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi, serta luas bangunan minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi.

Untuk daerah dengan keterbatasan lahan seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), tipe rumah subsidi yang berlaku tetap 21/60.

Banjir Kritik Sejak Awal

Banyak kalangan mempertanyakan ide Menteri Ara tentang rumah bersubsidi ukuran 18 m². "Kita ini bukan Hong Kong. Lahan kita masih luas. Tidak bisa disamakan. Membangun rumah bukan cuma soal atap dan tembok, tetapi ada nilai

sosial, budaya, bahkan spiritual di dalamnya," kata anggota Komisi V DPR, Yanuar Arif Wibowo, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Apabila pemerintah tetap memaksakan model superkecil, maka itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanat undang-undang dan semangat konstitusi.

"Kalau mau bangun rumah 18 meter, silakan saja untuk proyek komersial tetapi kalau pakai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), itu harus ikut aturan. Jangan dikurangi seenaknya," ujarnya.

Kritik dari pengamat properti Anton Sitorus, tak kalah pedasnya. Upaya pemerintah menekan harga rumah, jangan lantas mengorbankan

kualitas hidup penghuninya.

"Kalau terlalu kecil, ya bukan rumah subsidi lagi, tetapi rumah 'subsidi-die'," ucap Anton, mengutip keluhan netizen di media sosial. (wid,rls,ant,ist/dya)

UKURAN RUMAH SUBSIDI DARI MASA KE MASA



2002 - Era Megawati Soekarnoputri

- Luas tanah min. 60 m²
- Keluarga 3 orang: lantai 21,6–36 m²
- Keluarga 4 orang: lantai 28,8–48 m²
- SNI: dewasa 9,6 m²/org, anak 4,8 m²/org



2011 - Era Susilo Bambang Yudhoyono

- Minimal luas tanah untuk rumah sederhana: 60 m².
- Luas tanah subsidi dan rumah sederhana: 60–300 m².
- Luas lantai: 36 m², dapat ditambah hingga 72 m² untuk rumah sederhana dengan luas tanah 120 m².



2023 - Era Joko Widodo

- Luas tanah belum diubah:
 - Minimal 60 m².
 - Maksimal 200 m².
- Luas lantai:
 - Minimal 21 m².
 - Maksimal 36 m².



2025 - Era Prabowo (Batal)

- Dalam draf Kepmen PKP No./KPTS/M/2025:
 - Luas tanah subsidi diperkecil: minimal 25 m², maksimal 200 m².
 - Luas lantai juga diperkecil: minimal 18 m², maksimal 36 m².

Fokus Realisasikan 3 Juta Rumah Subsidi

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dua program unggulan Kementerian PKP pada tahun depan yakni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Kami harap dua program yang menjadi bagian Program 3 Juta Rumah (membangun dan merenovasi rumah) tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Ara.

Kementerian PKP akan mendorong pelaksanaan 2 program unggulan di sektor perumahan pada tahun 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat Indonesia.

"Ada dua program utama Kementerian PKP tahun 2026 mendatang yakni Program BSPS dan rumah subsidi. Ke dua program tersebut sudah saya sampaikan dalam Rapat Kabinet," ujar Ara.

Ia berharap dua program perumahan tersebut bisa terlaksana dengan baik untuk Kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ara menyatakan Program BSPS sangat penting untuk mengentaskan backlog 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia. Selanjutnya ada program rumah subsidi sebanyak 500.000 unit rumah bagi MBR dengan mendorong penyaluran KPR

Sejahtera FLPP.

"Target program BSPS adalah 2 juta unit dan rumah subsidi untuk MBR sebanyak 500.000 unit," katanya.

Program BSPS merupakan bagian dari wujud nyata negara hadir dalam membantu masyarakat untuk tinggal di rumah layak huni. Program BSPS dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, namun juga mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. (wid,rls,ant/dya)

Angka Pernikahan Anak di Kota Malang Sentuh 92 Kasus, Kedungkandang Tertinggi

MALANG - Sepanjang tahun 2024, angka pernikahan anak di Kota Malang tercatat sebanyak 92 kasus. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Kedungkandang menjadi wilayah dengan jumlah pernikahan anak tertinggi.

Data ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, saat membuka kegiatan bertema 'Stop Pernikahan Anak' yang diinisiasi oleh Forum Anak Kota Malang bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos - P 3 A P 2 K B), Kamis (10/7/2024).

"Karena angkanya ini masih tinggi sekali di tahun 2024 kemarin. Tercatat ada 92 anak yang melakukan pernikahan dini dan terbanyak ada di Kecamatan Kedungkandang," ujar Ali.

Ali menjelaskan, meski tren tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 126 kasus pada 2023, angka ini masih menyisakan kekhawatiran. Dirinya menilai perlu adanya langkah yang lebih konkret dan kolaboratif untuk menurunkan angka pernikahan anak secara signifikan.

"Kami merasa resah dengan hal ini. Maka Forum Anak bersama Pemkot menghadirkan pemateri dari pemerhati anak, Komite Pemerhati Anak Malang Raya, dan UIN Malang, untuk melakukan edukasi tentang dampak pernikahan anak," katanya.

Ali menambahkan, tantangan utama dalam menekan praktik ini berasal dari faktor sosial dan budaya. Termasuk pemahaman orang tua yang masih memegang pandangan lama.

Menurutnya, masih ada keyakinan di masyarakat yang menganggap jika anak-anak sudah masuk usia baligh, maka harus segera menikah agar tidak melanggar etika agama. "Di sisi lain, ada juga yang menganggap menikah bisa memperbaiki kondisi ekonomi," jelasnya.

Namun, menurut Ali, pandangan seperti itu justru dapat melanggengkan siklus kemiskinan baru karena anak-anak belum matang secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, Pemkot Malang terus mendorong pendekatan edukatif, baik kepada remaja maupun kepada orang tua.

"Kami berupaya memberi kesadaran melalui Forum Anak sebagai teman sebaya bagi generasi muda, dan juga melalui Dinsos untuk

memberi pemahaman kepada orang tua agar tidak menyeberakan pernikahan sebelum anak-anak siap," ucapnya.

Lebih lanjut, disinggung terkait target penanganan kasus ini, Ali menyampaikan harapan besar agar Kota Malang ke depan bisa terbebas dari praktik pernikahan anak.

"Target kami tentu bebas pernikahan anak, atau setidaknya hanya terjadi pada usia yang sudah matang. Karena selama ini, banyak pernikahan anak terjadi karena kehamilan duluan. Ini yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos - P 3 A P 2 K B Kota Malang, Kenprabandari Aprilia, menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan sosialisasi. Ia mengakui, upaya



Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin. (Santi/Lentera)

sosialisasi konvensional yang dilakukan selama ini perlu diperbarui agar lebih tepat sasaran.

"Di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 atau di (APBD) tahun 2026 nanti, kami akan mencoba metode yang lebih tepat. Sosialisasi saja tidak cukup, harus ada kolaborasi lintas lembaga supaya kegiatan ini bisa efektif," katanya. (Santi/Dya)

Pemkot Batu Klaim Perputaran Ekonomi Porprov Jatim Capai Rp 8 Miliar



(Ilustrasi) UMKM Alun-alun Kota Batu ramai pengunjung. (dok. Ist)

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengklaim perputaran ekonomi selama gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025 mencapai Rp8,3 miliar. Ini tampak dari penuhnya okupansi hotel dan meningkatnya aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar venue

pertandingan.

"Dari estimasi yang kami hitung, total perputaran uang selama Porprov bisa mencapai Rp8,3 miliar. Ini hasil dari survei rata-rata pengeluaran harian para peserta," ujar Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu, Onny Ardianto, dikutip pada Kamis (10/7/2025).

Untuk diketahui, perhelatan Porprov IX Jatim di Kota Batu digelar sejak 19 Juni hingga 5 Juli 2025 lalu. Selama 17 hari pelaksanaan, total 18 cabang olahraga (cabor) dipertandingkan di 16 venue yang tersebar di seluruh penjuru kota Apel tersebut. Ratusan atlet, pelatih, panitia, hingga pendukung dari 22 kabupaten/kota di Jawa Timur juga memadati Kota Batu.

Menurut Onny, setiap atlet ataupun tim resmi, diestimasi

menghabiskan pengeluaran harian sekitar Rp350 ribu, yang mencakup biaya penginapan, konsumsi, laundry, hingga jajan dan rekreasi ringan. Dengan jumlah kunjungan yang diperkirakan mencapai 14 ribu orang, perputaran ekonomi Kota Batu pun melonjak signifikan.

Hotel-hotel dan penginapan di Kota Batu disebut nyaris penuh selama periode Porprov. Sejumlah tempat seperti Hotel Asida, Crystal Inn, Hotel Orchid, hingga berbagai villa di kawasan Songgokerto dan Junrejo, sambungnya, juga menjadi lokasi favorit tempat tinggal kontingen.

"Sekarang katakanlah biaya menginap per orang per hari sekitar Rp250 ribu. Itu pun belum termasuk belanja kuliner, laundry, maupun tiket destinasi wisata," jelas Onny.

Tak hanya sektor perhotelan yang merasakan dampak langsung. Menurutnya, UMKM lokal juga turut kecipratan berkah dari ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi ini. Pemkot Batu juga telah menyediakan area khusus UMKM di sekitar venue pertandingan. Untuk mendukung pelaku usaha kecil

menjajakan produk unggulan mereka.

"Porprov ini selaras dengan konsep sport tourism yang kami dorong. Ini menjadi momentum positif setelah kunjungan wisata sempat turun di awal tahun," tambahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, M. Chori, menyebutkan jumlah kontingen resmi yang terdata di Kota Batu mencapai 3.483 orang. Mereka terdiri dari 562 atlet, 108 pelatih, 29 asisten pelatih, 13 mekanik, dan 41 personel satuan tugas.

"Rata-rata mobilitas harian bisa mencapai hampir seribu orang. Bisa lebih besar jika menghitung keluarga atlet, pendukung tim, serta masyarakat umum yang ikut menyaksikan pertandingan," ujar Chori.

Chori juga menyatakan, gelombang kedatangan tamu dari luar daerah turut dimanfaatkan sebagai ajang wisata. Kota Batu yang dikenal dengan berbagai destinasi unggulan seperti Jatim Park, Selecta, dan Museum Angkut, menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta dan keluarganya. (Santi/Dya)

BUNTUT DARURAT MILITER, MANTAN PRESIDEN KORSEL KEMBALI DITAHAN

Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali ditahan pada Kamis (10/7/2025) terkait deklarasi darurat militer yang berujung pada pemakzulan dan pencopotannya dari jabatan. Saat ini, Yoon berada dalam sel isolasi sambil menanti proses penyelidikan atas dugaan keterlibatannya dalam aksi pemberontakan.

Yoon menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik ketika dia berusaha menumbangkan pemerintahan sipil pada 3 Desember tahun lalu, dengan mengirimkan tentara bersenjata ke parlemen untuk mencegah para anggota parlemen menolak deklarasi darurat militernya.

Dia menjadi presiden pertama Korsel yang ditahan saat masih menjabat, ketika dia ditangkap dalam penggerebekan dramatis pada Januari lalu, setelah menghabiskan waktu berminggu-minggu melawan upaya penangkapan dengan mengerahkan para pengawal kepresidenan untuk menghalangi para penyelidik.

Namun dia dibebaskan atas dasar prosedural pada Maret, meskipun persidangan atas tuduhan pemberontakan masih berlanjut.

Setelah pemakzulan Yoon dikonfirmasi oleh pengadilan pada April lalu, seperti dilansir AFP, Kamis (10/7/2025), dia kembali menolak beberapa panggilan dari para penyelidik, yang mendorong mereka untuk mengupayakan penahanannya sekali lagi guna memastikan kerja sama.

Seorang hakim senior pada Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Nam Se Jin, mengatakan bahwa surat perintah penangkapan terbaru dirilis karena kekhawatiran Yoon akan "menghancurkan bukti" dalam kasus tersebut.

Ketika menghadiri persidangan yang berlangsung selama 7 jam pada Rabu (9/7/2025), Yoon yang berusia 64 tahun ini membantah semua tuduhan yang menjeratnya. Dia

mengatakan dirinya sekarang "berjuang sendirian".

"Penasihat khusus sekarang bahkan mengincar para pengacara pembela saya. Satu per satu pengacara saya mengundurkan diri, dan saya mungkin harus berjuang sendirian," ucapnya dalam persidangan.

Yoon kemudian dibawa ke pusat penahanan di dekat Seoul sembari menunggu putusan pengadilan soal penahanan terbarunya. Setelah surat perintah penahanan dikeluarkan pada Kamis (10/7/2025) pagi waktu setempat, Yoon lantas dijebloskan ke dalam sel isolasi di fasilitas penahanan tersebut.

Disebutkan bahwa Yoon mungkin ditahan hingga 20 hari ke depan saat jaksa bersiap mendakwa secara resmi, termasuk menjeratkan dakwaan tambahan.

"Setelah Yoon didakwa, dia dapat tetap ditahan hingga enam bulan setelah dakwaan," kata presiden



Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tiba di pengadilan untuk menghadiri sidang peninjauan surat perintah penangkapan yang diminta oleh jaksa khusus di Seoul, Korea Selatan, Rabu (9/7/2025). (Foto: Reuters)

Lawyers for a Democratic Society, Yun Bok Nam, kepada AFP.

"Secara teoritis, pembebasan segera dimungkinkan, tetapi dalam kasus ini, penasihat khusus berpendapat bahwa risiko pemusnahan barang bukti tetap tinggi, dan dakwaan tersebut telah didukung secara substansial," sebutnya.

Selama persidangan, tim kuasa hukum Yoon mengkritik permintaan penahanan itu sebagai hal yang tidak masuk akal, menekankan bahwa Yoon telah digulingkan dan "tidak lagi memegang kekuasaan apa pun".

Diketahui beberapa jam setelah ia berakhir di penjara, pengadilan mengadakan sidang pada Kamis (10/7/2025) pagi untuk

persidangan pemberontakannya, tetapi Yoon tidak hadir.

Pengacaranya mengatakan kepada pengadilan bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena masalah kesehatan, Kantor Berita Yonhap melaporkan.

Mahkamah Konstitusi menggulingkan Yoon sebagai presiden pada bulan April, menguatkan pemakzulan parlemen atas penerapan darurat militer, yang mengejutkan warga Korea Selatan dan memicu kekacauan politik selama berbulan-bulan.

Tim penuntut khusus meluncurkan penyelidikan setelah pemimpin baru Lee Jae Myung terpilih pada bulan Juni, dan telah menyelidiki tuduhan tambahan terhadap Yoon. (AFP, Reuters, ist/nei)

BOK Tahan Suku Bunga, Waspada Tarif AS

DI TENGAH kegaduhan politik, perekonomian Korea Selatan (Korsel) juga harus menghadapi guncangan tarif Trump.

Bank Sentral Korea Selatan (Bank of Korea/BOK) memilih untuk menahan suku bunga acuan tetap di angka 2,5% dalam pertemuan kebijakan pada Kamis (10/7/2025).

Dikutip dari Bloomberg, langkah tersebut dilakukan seiring dengan sikap bank sentral yang memantau dampak pelanggaran kebijakan sebelumnya terhadap lonjakan harga rumah serta risiko ekonomi akibat kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS).

Keputusan mempertahankan suku bunga itu sejalan dengan proyeksi seluruh 19 ekonom yang disurvei Bloomberg. Sikap BOK mencerminkan kehati-hatian bank sentral untuk tetap menjaga kebijakan moneter akomodatif, sembari mewaspada potensi ketidakseimbangan keuangan akibat melonjaknya harga apartemen di Seoul dan ketidakpastian kebijakan dagang AS.

Sejauh ini, BOK sudah memangkas suku bunga dua kali pada tahun ini,

setelah sebelumnya melakukan dua kali pemangkasan di kuartal IV/2024. Namun, bank sentral menahan diri dari melonggarkan kebijakan lebih agresif, lantaran khawatir memicu reli harga properti seperti periode pascapandemi.

Berdasarkan data Korea Real Estate Board, harga apartemen di Seoul tercatat naik 3,5% pada paruh pertama tahun ini.

Kendati demikian, para ekonom memperkirakan pemangkasan suku bunga selanjutnya kemungkinan terjadi pada Agustus mendatang, sebelum BOK mengambil jeda lebih panjang untuk mengevaluasi langkah pelanggaran berikutnya.

"Pemangkasan pada Agustus masih cukup mungkin, sebagian karena kebutuhan koordinasi kebijakan seiring ekspansi fiskal," ujar Kong Dongrak, ekonom di Daishin Securities Co.

Nilai tukar won memangkas penguatan awalnya dan berakhir cenderung mendatar terhadap dolar AS setelah pengumuman keputusan suku bunga. Sementara itu, imbal hasil

obligasi pemerintah Korea Selatan tenor 3 tahun terus turun, melemah sekitar 2 basis poin ke level 2,46%.

Keputusan BOK hari ini menandakan sikap hati-hati para anggota dewan kebijakan yang enggan melonggarkan kebijakan terlalu cepat, karena khawatir berkontribusi pada kenaikan utang rumah tangga.

Mereka juga memilih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait risiko perdagangan global serta kebijakan pemerintah dalam mengatur pasar properti sebelum kembali memangkas suku bunga.

Salah satu tantangan terbesar ekonomi Korea Selatan saat ini adalah mengantisipasi dampak tarif impor AS. Bersama negara lain, Seoul memperoleh perpanjangan waktu negosiasi sebelum tarif impor AS terhadap produk Korea dijadwalkan naik kembali menjadi 25% mulai 1 Agustus 2025. Selain itu, tarif spesifik sektor, seperti pada produk otomotif dan baja, juga masih menjadi hambatan signifikan bagi prospek pertumbuhan. (Bloomberg, Reuters, ist/nei)

Kaktus, Tanaman Hias yang Kaya Manfaat

Kaktus dikenal sebagai tanaman yang tangguh dan mampu bertahan di daerah kering. Selain sering dijadikan tanaman hias berkat bentuknya yang khas dan berduri, kaktus ternyata juga bisa dikonsumsi. Di sejumlah negara, terutama Meksiko, tanaman ini bahkan telah lama digunakan sebagai bahan makanan yang cukup populer.

Sebagian besar kaktus berasal dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Selain sebagai tanaman hias, kaktus juga digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai bahan makanan dan campuran produk perawatan kulit.

Salah satu jenis kaktus yang aman dikonsumsi adalah *Opuntia ficus-indica*, atau yang dikenal sebagai kaktus pir berduri. Pada kaktus ini, bagian daun dan buahnya lah yang dapat dimakan. Buah kaktus ini berbentuk oval, berkulit tebal, dan dipenuhi duri. Saat matang, daging buahnya memiliki rasa manis yang sering digambarkan mirip melon.

Kaktus memiliki banyak manfaat untuk tubuh yang sayang untuk dilewatkan, antara lain:

Melancarkan Pencernaan

Mengonsumsi kaktus ternyata bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan. Hal ini karena kaktus mengandung serat dalam jumlah tinggi, yang berperan penting dalam membantu proses pencernaan berjalan lebih efektif dan teratur.

Serat dalam kaktus membantu membentuk feses yang lebih padat, sehingga mempermudah pengeluarannya. Dengan begitu, risiko sembelit dapat dikurangi secara alami. Rutin mengonsumsi kaktus bisa menjadi cara sehat untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan.

Mengontrol Nafsu Makan

Serat pada kaktus tidak hanya bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengontrol rasa lapar. Proses pencernaan serat berlangsung lebih lambat, sehingga memberikan efek kenyang yang bertahan lebih lama setelah makan.

Dengan rasa kenyang yang lebih lama, nafsu makan pun menjadi lebih terkendali. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang sedang menjalani program penurunan berat badan atau ingin menjaga pola makan sehat. Mengonsumsi kaktus secara rutin dapat menjadi cara alami

untuk mendukung pengelolaan berat badan.

Mengontrol Kadar Gula Darah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kaktus pir berduri memiliki potensi dalam membantu menurunkan kadar gula darah, khususnya pada penderita diabetes tipe 2. Efek ini diyakini berasal dari kandungan seratnya yang cukup tinggi, yang memperlambat proses pencernaan dan penyerapan glukosa ke dalam aliran darah.

Karena pencernaan glukosa berlangsung lebih lambat, lonjakan kadar gula darah setelah makan dapat diminimalkan. Hal ini membuat kadar gula darah lebih stabil dan terkontrol, sehingga konsumsi kaktus pir berduri secara rutin bisa menjadi salah satu cara alami untuk membantu pengelolaan diabetes tipe 2.

Memiliki Efek Anti Peradangan

Kaktus juga kaya akan antioksidan yang diperlukan tubuh untuk melawan radikal bebas penyebab penyakit. Antioksidan dipercaya mampu menangkal radikal bebas penyebab peradangan, yang memicu berbagai penyakit dan gangguan kesehatan.

Dengan tingginya kandungan antioksidan di dalamnya, seperti betalain, flavonoid, dan polifenol, kaktus baik dikonsumsi agar tubuh terhindar dari kondisi peradangan.

Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh

Kaktus, terutama bagian buahnya, merupakan sumber alami vitamin C dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan ini berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat dan responsif terhadap berbagai ancaman penyakit.

Dengan kekebalan tubuh yang meningkat, tubuh menjadi lebih mampu melawan infeksi,

virus, serta melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Mengonsumsi buah kaktus secara rutin dapat menjadi cara alami untuk menjaga daya tahan tubuh tetap optimal.

Menjaga Kesehatan Kulit dan Rambut

Kaktus dianggap dapat membuat kulit jadi bercahaya dan rambut jadi berkilau. Ini bisa dikarenakan kaktus memiliki vitamin C, pigmen betalain, dan antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus berfokus pada manfaat kaktus pir berduri untuk kulit atau rambut.

Menurunkan Risiko Kanker

Sebuah penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa kaktus dapat menghambat pertumbuhan tumor di dalam tubuh. Manfaat ini berasal dari kandungan antioksidan yang begitu beragam.

Dengan makan kaktus, Anda bisa mendapatkan antioksidan berupa pektin, karoten, asam askorbat, betalain, polifenol, dan asam galat. Seluruh senyawa antioksidan ini melindungi tubuh Anda dari radikal bebas yang memicu pembentukan kanker.

Menurunkan Kolesterol

Kaktus, terutama jenis nopalitos mengandung serat larut yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Serat larut membantu mengikat kolesterol dalam usus dan mencegahnya diserap ke dalam aliran darah. Hal ini dapat menjaga kolesterol darah tetap normal.

Tanaman kaktus ini juga mengandung fitosterol yang mirip dengan struktur kolesterol. Ketika fitosterol diserap oleh tubuh, ia dapat menggantikan kolesterol dalam usus dan menghambat penyerapannya.

Jika Anda penasaran ingin tahu bagaimana rasa kaktus, pilih yang umumnya aman dimakan, seperti kaktus pir berduri. Soalnya, beberapa jenis kaktus dapat menyebabkan keracunan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. (nei,ist/dya)



Fenomena Aphelion 2025, Ini Dampaknya bagi Indonesia

Setiap tahunnya, Bumi melewati fase di mana posisinya berada paling jauh dari Matahari, yang disebut sebagai "Aphelion." Pada tahun 2025, peristiwa ini terjadi pada 4 Juli sekitar pukul 02.54 WIB, dan efeknya diperkirakan masih terasa hingga bulan Agustus.

Pada momen tersebut, jarak antara Bumi dan Matahari mencapai sekitar 152.087.738 kilometer. Sebagai gambaran, jarak rata-rata antara keduanya umumnya berkisar 149,6 juta kilometer.

Meski terdengar seperti kejadian luar angkasa yang jauh dari kehidupan sehari-hari, Aphelion sebenarnya memiliki beberapa ciri khas dan dampak yang bisa dirasakan.

Lalu, seperti apa tanda-tanda terjadinya Aphelion dan adakah pengaruhnya terhadap kondisi cuaca atau lingkungan di Bumi, khususnya di Indonesia? Simak penjelasan berikut ini, untuk memahami fenomena alam ini secara lebih mendalam, yang telah dihimpun dari berbagai sumber.

FAKTA MENARIK

Fenomena Aphelion merupakan kondisi astronomi di mana Bumi berada pada jarak paling jauh dari Matahari dalam lintasannya yang berbentuk elips. Beberapa ciri yang

menandai terjadinya Aphelion antara lain:

Terjadi Setahun Sekali

Aphelion merupakan peristiwa tahunan yang terjadi secara teratur, biasanya berlangsung pada awal Juli.

Tidak Terlihat Dengan Mata Telanjang

Berbeda dengan fenomena astronomi lain seperti gerhana, Aphelion tidak bisa diamati secara langsung di langit. Ini adalah perubahan posisi Bumi dalam orbitnya yang hanya bisa diketahui melalui perhitungan astronomi.

Bumi Berada di Titik Terjauh dari Matahari

Salah satu tanda utama Aphelion adalah posisi Bumi yang mencapai jarak terjauh-nya dari Matahari, yaitu sekitar 152,1 juta kilometer. Angka ini lebih jauh dibandingkan dengan saat Perihelion, ketika Bumi berada paling dekat dengan Matahari.

Ukuran Matahari Terlihat Lebih Kecil

Karena Bumi berada lebih jauh,

Matahari akan tampak sedikit lebih kecil dari biasanya. Walaupun perbedaannya sangat kecil dan tidak begitu terasa tanpa bantuan alat pengamatan khusus.

DAMPAK FENOMENA APHELION 2025

Sebagian masyarakat mengira Aphelion dapat menyebabkan penurunan suhu ekstrem atau cuaca buruk, bahkan dikaitkan dengan flu, batuk, dan

sesak napas. Padahal, anggapan ini kurang tepat.

Menurut BMKG, Aphelion tidak berdampak langsung terhadap suhu atau cuaca ekstrem di Indonesia. Suhu dingin yang terasa pada Juli-Agustus, khususnya di Jawa, Bali, dan NTT, lebih dipengaruhi oleh angin muson timur dari Australia yang sedang musim dingin. Angin ini membawa udara dingin dan kering, sehingga suhu terasa lebih sejuk, terutama malam hingga pagi hari.

Penurunan suhu ini bukan akibat jarak Bumi yang jauh dari Matahari, melainkan karena pola angin musiman yang terjadi setiap tahun.

BMKG menegaskan, Aphelion adalah fenomena astronomi tahunan yang tidak berbahaya dan tidak menyebabkan perubahan iklim atau bencana cuaca. Sebaliknya, ini bisa menjadi momen edukatif untuk memahami gerak Bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Umbria, Kota Mewah Italia yang Tak Banyak Dikenal



Bevagna



Spello



Todi



Castello

Masih terdapat banyak kota di Italia yang kurang mendapat sorotan, meskipun menawarkan kemewahan setara dengan kota-kota ikonik lainnya. Salah satunya adalah Umbria, yang berada di antara Tuscany dan Lazio di wilayah Italia tengah. Belum lama ini, CV Villas agen perjalanan asal London menobatkan Umbria sebagai destinasi musim panas paling mewah namun belum banyak dikenal di Eropa.

"Umbria adalah bukti bahwa destinasi yang kurang dikenal di Eropa memberikan pengalaman otentik yang jauh dari jalur wisata biasa," pernyataan agen perjalanan tersebut.

Setelah Umbria, kota selancar Biarritz, Prancis, berada di peringkat 2. Biarritz terletak di sepanjang pantai Basque di Prancis barat daya dan memiliki pantai berpasir panjang dengan sekolah selancar dan bongkahan batu yang ikonik, Rocher de la Virginie. Beberapa kota di Prancis yang termasuk dalam daftar tersebut, Brittany, Antibes, Bordeaux, Montpellier, dan Occitanie.

Daya Darik Umbria

Umbria sering disebut sebagai "jantung hijau" Italia. Meski masih kurang dikenal dibandingkan kota-kota lainnya, tetapi tidak kalah mempesona. Terdapat beberapa kota-kota hidden-gem yang memiliki daya tarik tersendiri. Seperti Asisi, Spello,

dan Montefalco, yang berlokasi di punggung bukit. Kota-kota ini sering kali memiliki arsitektur Romawi berusia berabad-abad, kuliner lokal yang lezat, dan piazza yang masih menjadi pusat kehidupan sehari-hari.

Dikutip dari Lonely Planet, Umbria kaya budaya, dari kota-kota di puncak bukit abad pertengahan hingga gereja-gereja yang indah, situs arkeologi, dan pameran seni kontemporer. Kota ini juga menjadi tuan rumah bagi berbagai perayaan dan festival yang menyoroti makanan, musik, seni, dan sejarah, yang menarik pengunjung dari seluruh dunia ke Italia bagian tengah.

Kota yang Wajib Dijelajahi

Umbria penuh dengan kota-kota tua yang menawan dan tempat-tempat indah untuk dikunjungi. Setiap orang punya favorit masing-masing dari daftar yang panjang, jadi ini hanyalah beberapa destinasi favorit kami.

Foligno

Foligno, kota terbesar ketiga di Umbria, menawarkan pesona unik meski tak berada di puncak bukit. Daya tarik utamanya meliputi centro storico bergaya abad pertengahan, Piazza della Repubblica, Cattedrale di San Feliciano, dan Palazzo Trinci. Kota ini juga dikenal lewat festival budaya seperti Giostra della Quintana dan jazz tahunan. Jangan lewatkan karya seni modern Calamita Cosmica serta

pengalaman berbelanja kasmir sambil menikmati makan siang.

Kota Castello

Città di Castello dikenal dengan warisan arsitekturnya yang kaya, termasuk Palazzo Comunale dan Duomo yang megah. Kota ini juga memiliki kancah seni yang hidup, dengan galeri, studio seniman, dan acara budaya sepanjang tahun. Salah satu acara terkenal di Città di Castello adalah Festival of Nations, festival musik kamar dan orkestra internasional. Kota ini juga merupakan tempat kelahiran seniman abstrak Alberto Burri.

Kota ini memiliki dua museum yang didedikasikan untuknya: Fondazione Palazzo Albizzini, yang menyimpan banyak koleksi Burri, dan Ex Seccatoi del Tabacco, tepat di luar pusat kota, sebuah pabrik pengeringan tembakau tua yang telah disulap menjadi ruang pameran mengesankan yang didedikasikan untuk karya-karya besar sang seniman.

Bevagna

Bevagna terletak 24 kilometer di tenggara Perugia dan, meskipun bukan kota di puncak bukit, nuansanya sangat kental dengan Umbria kuno, dengan tembok abad pertengahan, jalanan berbatu, dan gereja-gereja kuno seperti San Michele Arcangelo dan San Silvestro bergaya Gotik, keduanya

menyimpan karya seni yang berharga.

Bevagna juga terkenal dengan alun-alun utamanya, Piazza Silvestri, dengan Palazzo dei Consoli. Jangan lewatkan Terme Romane, yang dihiasi mosaik, dan Teatro Francesco Torti. Kota ini terkenal dengan kerajinan tradisionalnya, termasuk keramik dan besi tempa, serta Mercato delle Gatte, sebuah festival abad pertengahan besar yang diadakan setiap bulan Juni.

Spello

Spello adalah salah satu kota tercantik di Umbria, berkat balkon-balkonnya yang dipenuhi bunga-bunga yang semakin mempercantik jalanan dan gang-gang berbatunya. Beberapa objek wisatanya yang paling terkenal adalah Chiesa di Santa Maria Maggiore, dengan fresko karya Pinturicchio, dan Cappella Baglioni, yang dihiasi karya seni Renaisans yang langka.

Todi

Todi adalah salah satu kota terindah di Umbria: permata arsitektur sekaligus destinasi seni yang masih mempertahankan pesona kunonya. Kunjungi Cattedrale di Santa Maria Assunta, lalu Chiesa di San Fortunato dengan fresko Renaisansnya. Festival Todi adalah perayaan tahunan musik klasik, sementara Beverly Pepper Projects Foundation merupakan ruang pameran di centro storico. (nei,ist/dya)

Diperiksa KPK, (dari Hal 1) ...

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjalani proses pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim selama delapan jam. Khofifah tiba sekitar pukul 09.50 WIB menaiki mobil Innova warna hitam bernopol W 3349 YS. Namun ia masuk melalui pintu sisi belakang Gedung Tribrata yang tak terawasi oleh jurnalis, selanjutnya menjalani pemeriksaan secara tertutup.

Sekitar pukul 18.25 WIB, Khofifah keluar dari ruang dan memberikan keterangan pada media yang telah menunggu. Di awal keterangannya, Khofifah mengatakan telah memberikan penjelasan cukup lengkap. Dia juga mengaku menjelaskan struktur pejabat yang terlibat dalam mekanisme penyaluran dana hibah dari tahun 2021 hingga 2024.

Kepada wartawan, Khofifah menegaskan bahwa seluruh pertanyaan penyidik sudah ia jawab secara jelas dan rinci. Ia memastikan bahwa kedatangannya hari ini, untuk memberikan keterangan secara lengkap agar menjadi bagian dari informasi yang dibutuhkan KPK.

"Saya memberikan penjelasan lengkap. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan KPK," ujar Khofifah di hadapan para awak media.

Khofifah mengaku tidak banyak mendapat pertanyaan dari penyidik, namun lebih banyak diminta untuk menjelaskan soal struktur pejabat yang terlibat dalam mekanisme penyaluran dana hibah dari tahun 2021 hingga 2024. Ia menyebutkan, bahwa fokus utama penyidik hari ini adalah menggali proses administratif dan kebijakan penyaluran dana hibah dari Pemprov Jatim.

"Ndak banyak pertanyaan. Banyak terkait struktur, kepala dinas, kepala badan, kepala biro 2021-2024," katanya.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu menegaskan bahwa seluruh penyaluran dana hibah selama masa pemerintahannya, telah dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Ia tidak merinci lebih lanjut isi pemeriksaan, namun menyampaikan dengan tegas bahwa tidak ada prosedur yang dilanggar dalam pengalokasian maupun penyaluran dana tersebut.

"Saya ingin menyampaikan, semua proses penyaluran dana hibah dari Pemprov sudah sesuai prosedur," tegas Khofifah.

Dalam memenuhi panggilan KPK itu, Khofifah didampingi mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Lilik Pudjiastuti. Kehadiran Lilik memberikan sinyal aspek legal administratif dari proses pengelolaan hibah di Pemprov Jatim juga menjadi sorotan dalam pemeriksaan tersebut.

Sebagai manta pejabat struktural yang memahami sistem regulasi internal, Lilik berperan penting dalam

memberikan dukungan dokumen maupun klarifikasi hukum terkait alur verifikasi dan pemberian hibah kepada Pokmas.

Pemeriksaan Khofifah hari ini berlangsung setelah sebelumnya ia tidak hadir dalam pemanggilan pertama oleh KPK, karena sedang berada di luar negeri dalam rangka menghadiri agenda pendidikan. Kehadirannya di Polda Jatim kali ini dilakukan tertutup, tanpa konvoi resmi maupun penyambutan.

Sementara itu, Wakil Ketua PK, Johanis Tanak mengatakan bahwa pemanggilan terhadap Gubernur Khofifah ini bukan pemeriksaan, namun untuk meminta keterangan. Dia menandakan bahwa di KPK tidak ada kata pemeriksaan yang ada adalah diminta keterangan saksi atau keterangan ahli.

Johanis juga mengatakan bahwa keputusan untuk tempat pemanggilan yaitu di Polda Jatim adalah untuk menghemat anggaran. "Itu efisiensi waktu dan anggaran dan tidak ada larangan," katanya.

Namun demikian, KPK tetap meminta izin atas penggunaan tempat pemanggilan, dalam hal ini meminta izin pada Polda Jatim. "Kalau ada larangan bahwa tidak boleh menyidik atau menyelidik untuk melakukan penyelidikan di suatu tempat maka kami tidak akan lakukan," ucap Yohanis.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr Nur Basuki Minarno SH M Hum, mengatakan bahwa pemanggilan kepala daerah dalam hal ini Gubernur Khofifah untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022, adalah lumrah dan wajar.

Prof Basuki mengatakan kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Jadi kalau gubernur diminta keterangan itu sangat wajar. Tapi yang perlu dicatat jikalau ada seseorang diperiksa sebagai saksi, belum tentu mereka terlibat," tegas Prof Basuki pada media, Kamis (10/7/2025).

Lebih lanjut Prof Basuki mengatakan penyidik KPK memerlukan keterangan dari banyak sumber seperti dari saksi, ahli, hingga keterangan tersangka. Dalam proses penyidikan, lanjutnya, pemeriksaan saksi menjadi sangat penting karena saksilah yang mengetahui, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa.

"Dan keterangan saksi itupun tidak berdiri sendiri karena nantinya akan dicocokkan dan dilihat apakah memiliki kesesuaian, berelevansi dengan data yang lain," ujarnya.

Terlebih kasus ini konteksnya adalah dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur. "Kalau gubernur tidak

diperiksa ya akan menjadi aneh karena produknya pengeluaran anggaran kan Pergub. Tapi kembali lagi yang ditekankan, tidak selalu yang diperiksa sebagai saksi adalah pihak yang terlibat dalam permufakatan jahat," imbuh Prof Basuki.

"Prinsipnya dalam hukum pidana siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang dimintai tanggung jawab pidana. Dalam pemberian hibah pasti melibatkan eksekutif dengan legislatif dalam perencanaan dan penganggaran sampai ditetapkannya APBD," tegas Prof Basuki.

"Jika kemudian dalam pelaksanaannya ada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian daerah, maka pihak tersebutlah yang harus bertanggung jawab," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Pakar Hukum Administrasi Unair, Emanuel Sujatmoko. Ia optimistis masyarakat maupun pihak yang berwenang tak mudah tergiring opini dengan pernyataan saling serang yang dilontarkan para saksi dalam kasus ini.

"Karena APH dalam menentukan apakah itu peristiwa memuat unsur pidana atau tidak itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdiri dari alat bukti dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Bukan atas penilaian ataupun asumsi dari seseorang atau saksi. Terlebih saksi yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dalam perkara tersebut," urai Emanuel.

"Kami optimis Gubernur Khofifah menjalani pemeriksaan swbagai bentuk tanggung jawab, dan saya juga percaya seluruh pejabat di Jatim menaati dan menjalankan prosedur hukum yang ada. Termasuk dalam menghadapi pemeriksaan hukum atas kasus yang saat ini sedang berlangsung," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022 ini KPK telah menetapkan 21 orang tersangka. Sebanyak 21 tersangka itu terdiri dari 4 penerima suap dan 17 pemberi suap.

Para tersangka penerima suap itu terdiri dari 3 orang penyelenggara negara dan 1 orang staf penyelenggara negara. Sementara, dari 17 tersangka pemberi suap, 15 di antaranya adalah pihak swasta, sedangkan 2 orang lainnya adalah penyelenggara negara.

Kusnadi Diperiksa di Jakarta

Sementara di Jakarta, KPK memanggil mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi (KUS). "Hari ini Kamis (10/7/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan penyidikan terkait TPK Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim tahun anggaran 2021 - 2022," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

Pemanggilan untuk Kusnadi dilakukan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama KUS Ketua DPRD Provinsi

Jawa Timur periode Tahun 2019-2024. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur atas nama KIP Gubernur Jawa Timur," sebutnya.

Bahkan, Budi juga mengatakan kalau KPK melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan Kusnadi. Pemeriksaan ini sebagai langkah berikutnya termasuk melakukan penahanan. "Tadi juga dilakukan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatannya. Jadi, kondisi kesehatan itu juga menjadi pertimbangan penyidik ya untuk melakukan langkah-langkah berikutnya, seperti penahanan dan sebagainya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, lanjut Budi, menyatakan bahwa kondisi pimpinan DPRD Jatim periode 2019-2024 tersebut dinyatakan sedang tidak cukup fit atau kurang sehat. Oleh sebab itu, dia mengatakan akan menyampaikan lebih lanjut mengenai langkah KPK terhadap Kusnadi.

"Nanti kami sampaikan jika sudah ada rencana penahanannya. Tentu dari pemeriksaan tadi juga dipertimbangkan terkait dengan kondisi yang bersangkutan," katanya.

Perjalanan Kasus

Berawal pada 14 Desember 2022, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak dan Rusdi di gedung DPRD Jawa Timur. OTT berawal dari laporan akan adanya penyerahan sejumlah uang dari Ilham Wahyudi kepada Rusdi di sebuah mal di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Uang itu disebut terkait pengurusan alokasi dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023.

KPK juga menangkap Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi di kediamannya masing-masing di Kabupaten Sampang. Dalam kasus ini, Sahat ditetapkan menjadi tersangka penerima suap bersama stafnya, Rusdi. Sementara dua orang lainnya yang merupakan tersangka pemberi suap.

KPK menduga Sahat menerima suap Rp 1 miliar dari pengurusan dana hibah tahun 2022. Uang itu baru sebagian dari komitmen fee yang diperoleh Sahat sebanyak Rp 2 miliar.

Kemudian, pada 26 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur, memvonis Sahat dengan hukuman 9 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidi penjara 6 bulan. Selain itu, juga mewajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 39,5 miliar.

Majelis hakim yang sama juga memvonis Rusdi dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Apa bila tak mampu membayar denda, Rusdi mesti menggantinya dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Pada 12 Juli 2024, KPK mengumumkan menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut. Dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang sebagai tersangka pemberi suap. (pra,rls,ant/lut)



DPRD Surabaya Sahkan RPJMD 2025-2029

BAHTIYAR RIFAI: SINKRONISASI KOTA, PROVINSI DAN NASIONAL HARUS SESUAI KEBUTUHAN WARGA

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025–2029 yang baru disahkan, dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun RPJMD nasional.

"Saya berharap ke depan RPJMD Kota Surabaya sinkron dengan RPJMD provinsi maupun nasional. Agar program tidak berjalan sendiri-sendiri," kata Bahtiyar ketika ditemui Lentera di ruang kerjanya, Kamis (10/7/2025).

Diketahui, RPJMD Kota Surabaya telah disahkan pada Rabu (9/7/2025). Pengesahan ini hanya berselang dua hari dari pengesahan RPJMD Provinsi Jatim.

Diungkapkannya, salah satu fokus utama dalam RPJMD Kota Surabaya adalah peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta indeks pembangunan manusia (IPM).

Dalam sektor pendidikan, RPJMD menargetkan pembangunan empat Sekolah Dasar (SD) dan sembilan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tahun 2030. Namun Bahtiyar menilai hal tersebut perlu diimbangi dengan perencanaan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang menjadi kewenangan provinsi.

"Jumlah siswa SMA yang belum terakomodir di sekolah negeri masih tinggi. Tidak bisa hanya mengandalkan beasiswa Pemuda Tangguh, itu sangat terbatas," ungkapnya.

Di bidang kesehatan, Politis dari Fraksi Gerindra ini menjelaskan, Pemkot Surabaya merencanakan pembangunan rumah sakit di wilayah Surabaya Selatan dan Utara hingga 2030. Menurutnya, skema pembiayaan alternatif yang direncanakan untuk proyek ini harus dikaji lebih dalam dan dikomunikasikan secara terbuka dengan DPRD.

"Kalau mau pakai pembiayaan



Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi (Kiri) bersama empat pimpinan DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Bahtiyar Rifai, Lalila Mufidah dan Arif Fathoni usai menandatangani pengesahan RPJMD Kota Surabaya Rabu (9/7/2025).

alternatif, harus ada skala prioritas. Misal, tahun 2026 fokusnya di jalan X, maka harus jelas berapa kebutuhan dananya, berapa pinjamannya, bunganya, dan sebagainya," jelasnya

Bahtiyar juga mengingatkan pentingnya kajian lokasi dan pelibatan masyarakat dalam rencana pembangunan rumah sakit agar tidak ada warga yang dirugikan.

"Jadi, jangan sampai apa yang dikerjakan Pemerintah Kota Surabaya ini mengganggu kenyamanan warga Kota Surabaya," tambahnya.

Soroti Masalah Klasik

Tak hanya itu, Bahtiyar juga menyoroti masalah banjir yang dinilai sebagai persoalan klasik. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air.

"Pemkot habiskan banyak anggaran untuk bangun saluran. Tapi kalau masyarakat masih buang sampah sembarangan, ya mustahil efektif. Ini soal kesadaran bahwa kota ini milik warga juga," tuturnya.

Dalam pembangunan infrastruktur kampung, Bahtiyar meminta agar aspirasi dari RT, RW, dan lurah diakomodasi dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kota agar tidak terjadi tumpang tindih.

Ia juga menyoroti pentingnya

respons cepat Pemkot terhadap pembangunan jalur double track Surabaya–Sidoarjo oleh pemerintah pusat dan provinsi. Menurutnya, Pemkot perlu menyiapkan sistem transportasi seperti feeder untuk mendukung transportasi massalnya.

Di bidang ekonomi, terutama sektor pasar tradisional, Bahtiyar mengusulkan agar pemkot bekerja sama dengan pihak swasta untuk merevitalisasi pasar agar lebih bersih dan menarik.

"Banyak warga enggan ke pasar karena terlihat kumuh. Kalau ditata ulang, ekonomi warga bisa berputar lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh pihak yang telah berperan dalam pembahasan Raperda RPJMD.

Ia menegaskan visi utama RPJMD kali ini adalah menjadikan Surabaya sebagai kota kelas dunia dalam lima tahun ke depan.

"Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik agar makin efisien dan mudah diakses. Transportasi umum massal juga akan kami kembangkan untuk mengatasi kemacetan dan menunjang mobilitas warga," ujar Eri.

Peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus jangka panjang, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menargetkan peningkatan signifikan hingga tahun 2030, termasuk dalam hal lama sekolah.

Lebih lanjut, Eri menekankan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat menjadi elemen kunci.

"Kota dunia itu dibangun dengan gotong royong. Ketika masyarakat terlibat aktif, pertumbuhan ekonomi dan IPM akan lebih cepat tercapai," pungkasnya. (advama/lut)



Saya berharap ke depan RPJMD Kota Surabaya sinkron dengan RPJMD provinsi maupun nasional. Agar program tidak berjalan sendiri-sendiri."

BAHTIYAR RIFAI

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

